PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR MELALUI METODE DILEMA MORAL

Johar Alimuddin
Dosen STKIPMajenang
Al Darmono
Dosen IAI Ngawi

ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dan masyarakat umum. Korupsi seperti sebuah pelengkap hidup masyarakat Indonesia, sebab setiap hari diberitakan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, baik di media cetak maupun elektronik. Korupsi dianggap sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Pencegahan dan usaha mengurangi korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk melawan dan menolak adanya korupsi di Indonesia. Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satu yang dapat digunakan yaitu pendidikan antikorupsi dengan metode dilema moral. Pendidikan antikorupsi melalui dilema moral dapat dilakukan dengan memberikan sebuah kasus dilema moral berkaitan dengan korupsi atau nilai-nilai universal seperti kejujuran dan melakukan perbuatan baik untuk semua orang yang harus diselesaikan peserta didik. Metode dilema moral dapat membantu menanamkan sikap serta membentuk karakter antikorupsi pada peserta didik dengan baik, sebab peserta didik diajak mengambil keputusan sendiri berdasarkan hasil menganalisis dan berpikir kritis. Selain itu, melalui dilema moral tidak ada indoktrinasi yang dilakukan oleh guru, hal ini dapat membuat penanaman nilai antikorupsi kepada peserta didik menjadi lebih baik sebab nilai antikorupsi tersebut benar-benar muncul dari diri peserta didik sendiri.

Kata Kunci: Pendidikan, Antikorupsi, Dilema Moral

A. PENDAHULUAN

Korupsi sudah menjadi permasalahan yang sering ditemui di Indonesia. Korupsi seperti sebuah pelengkap hidup masyarakat Indonesia, sebab setiap hari diberitakan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, baik di media cetak maupun elektronik. Permasalahan korupsi ini bukan permasalahan sepele bagi bangsa Indonesia sebab korupsi dapat merugikan orang lain, bahkan korupsi yang dilakukan para pejabat berpotensi merugikan masyarakat dalam skala yang luas.

Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara atau kalangan atas, di kalangan bawah seperti kelurahan juga ada indikasi korupsi misalnya saja pemungutan biaya dalam pembuatan KTP padahal pembuatan KTP seharusnya gratis. Selain itu korupsi sudah terjadi di berbagai bidang kehidupan mulai dari ekonomi, kesehatan, kehutanan, pendidikan, bahkan agama. Sudah sangat jelas bahwa korupsi sangat meresahkan dan harus segera diberantas dari bumi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa pertanyaan yaitu: Apakah korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia? Jika sudah menjadi budaya apakah korupsi tersebut bisa dihilangkan? Bagaimana cara menghilangkannya? Semenjak ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu persatu kasus korupsi dapat terkuak. Namun tidak cukup hanya sampai disitu pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya harus dilakukan. Memberantas korupsi tersebut harus diiringi perubahan pola pikir, perubahan mental, dan tentu saja perubahan moralitas serta karakter yang semakin baik, perubahan pola pikir tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, terutama pendidikan karakter anti korupsi. Memang butuh waktu cukup lama tetapi jika pendidikan antikorupsi dapat merubah pola pikir dan mental masyarakat serta membentuk moral dan karakter yang baik niscaya korupsi akan berkurang bahkan bisa saja lenyap dan hilang dari bumi Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Korupsi

Sudah tidak asing lagi memang kata korupsi di telinga masyarakat Indonesia, namun apakah definisi atau arti dari kata korupsi itu? mungkin tidak semua orang tahu. Namun secara umum orang awam mengartikan bahwa korupsi adalah mencuri uang negara. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Arti

kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian¹.

Menurut Purwadarminta korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.² Sementara menurut Raden Subekti Tjitrosoedibio sebagaimana yang dikutip Yamin, menjelaskan bahwa korupsi adalah dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.³ Pendapat lain menyatakan bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para pegawai publik.⁴

Berdasarkan uraian di atas tentang definisi korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dan masyarakat umum. Korupsi merupakan tindak pidana menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu orang yang terbukti melakukan tindakan korupsi maka akan ditindak secara pidana oleh hukum. Korupsi bersifat lebih luas daripada pendapat orang-orang awam yang dikemukakan sebelumnya, merupakan tindakan buruk yang merugikan negara dan masyarakat umum tidak hanya sekedar tindakan mencuri tetapi bisa juga tindakan menyuap atau menyogok.

Praktik korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral, tapi lebih dari itu, korupsi telah menciptakan *banalitas* korupsi, yakni menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Inilah yang menyebabkan korupsi menjadi sangat berbahaya, korupsi sudah dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia, korupsi dianggap sebagai sebuah budaya.

¹Nanang T Puspito, et al., *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hal. 36.

²W.J.S. Purwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 524

³Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung : Pustaka, 2012), hal. 200

⁴Nadiatus Salama. *Motif dan Proses Psikologi Korupsi*. *Jurnal Psikologi* Vol. 41 No. 2., Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada: 2014), hal.150

Padahal korupsi itu menggerogoti negara secara perlahan menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Jika tidak secepatnya ditangani maka bersiap saja negara ini akan hancur karena korupsi, setiap orang saling berebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kemaslahatan untuk orang banyak dan masyarakat secara umum.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi, menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: (1) Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah, (2) Rendahnya moral, dan (3) Penegakan hukum yang lemah⁵. Sementara itu, pendapat lain diungkapkan Graaf & Huberts sebagaimana yang dikutip Salma bahwa motif seseorang dalam melakukan korupsi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan secara materi, tapi juga agar bisa meningkatkan hubungan pertemanan, percintaan, status, dan pencitraan, serta membuat orang lain jadi terkesan, terpesona, dan mudah terpengaruh⁶.

Korupsi itu berbahaya bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena itu korupsi harus dibasmi dari bumi pertiwi. Pope menyatakan “membasmi korupsi tidak bertujuan untuk mengakhiri korupsi semata, tapi lebih pada suatu cara untuk membuat pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan adil.”⁷ Korupsi tidak hanya sekedar perlu di basmi dan bumi hanguskan tetapi pemerintahan yang baik juga harus diwujudkan. Percuma ada KPK jika pemerintahan masih saja buruk seban indikasi terbesar terjadinya korupsi ada di pemerintahan. Jadi KPK saja tidak cukup korupsi masih perlu dilawan dengan perubahan pola pikir dan perubahan mental ke arah yang lebih baik serta moralitas yang baik pula, dan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui pendidikan. Jadi pendidikan merupakan

⁵ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal. 19-20

⁶ Nadiatus Salama. *Motif dan Proses*. hal. 150

⁷ Nadiatus Salama. *Motif dan Proses*. hal. 150

salah satu jalan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia melalui Pendidikan Antikorupsi.

2. Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital agar generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tidak saja mampu menjadikannya *life-longlearners* sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di era informasi yang bersifat global, tetapi juga mampu berfungsi dengan peran serta yang positif baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, maupun warga dunia⁸. Uraian tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah agar peserta didik dapat berperan serta positif sebagai pribadi, anggota keluarga, dan warga negara serta warga dunia. Untuk dapat berperan serta secara positif salah satunya adalah dengan tidak melakukan korupsi. Jadi pendidikan karakter antikorupsi perlu juga diajarkan pada peserta didik sejak dini. Istilah pendidikan karakter antikorupsi ini bisa juga disebut dengan pendidikan antikorupsi, sebab pada pendidikan antikorupsi sudah pasti di dalamnya pendidikan karakter yaitu pendidikan karakter antikorupsi itu sendiri.

Pendidikan antikorupsi sebetulnya berasal dari dua kata yaitu Pendidikan dan Antikorupsi. Untuk dapat mengartikan apa itu pendidikan antikorupsi harus diketahui terlebih dahulu apa makna dari masing-masing kata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁹ Kemudian Sugihartono mendefinisikan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan

⁸ Darmiyati Zuchdi, dkk. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Bidang Studi Di Sekolah Dasar*. Cakrawala Pendidikan, Mei 2010 (Yogyakarta: UNY Press, 2010), hal. 1-12.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 232.

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan¹⁰. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pendidikan mempunyai tujuan untuk mengubah perilaku seseorang melalui sebuah kegiatan pengajaran dan pelatihan.

Pengertian lain tentang pendidikan yang perlu dicermati yaitu pendidikan menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003, yang menyatakan “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”¹¹. Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana kalimat ini dapat diartikan bahwa pendidikan itu atas dasar kesadaran tentang apa yang dibutuhkan. Terencana dapat diartikan prosesnya direncanakan, ditata, dan di susun sedemikian rupa untuk mencapai sebuah tujuan tujuannya ada pada kalimat berikutnya yaitu mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Antikorupsi merupakan gabungan dua kata yang berasal dari kata anti dan korupsi. Definisi atau arti kata korupsi sudah diketahui dari bagian sebelumnya yaitu suatu perbuatan tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dan masyarakat umum. Sementara kata anti dapat diartikan tidak setuju, tidak suka, melawan atau menolak. Jadi pendidikan antikorupsi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk melawan dan menolak adanya korupsi di Indonesia. Usaha sadar dan terencana tersebut masuk di dalam seluruh komponen belajar dan pembelajaran termasuk kurikulum, dan proses interaksi antara guru dan peserta didiknya. Kurikulum dan proses pembelajarannya disusun dan

¹⁰ Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta : UNY Press, 2007). hal, 3-4

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

dipersiapkan serta ditujukan untuk membuat peserta didik tidak melakukan tindakan korupsi.

Pendidikan antikorupsi menurut Sumiarti, adalah tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi.¹² Mentalitas antikorupsi dapat terwujud jika secara sadar kemampuan generasi mendatang dibina untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Terkait pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang menolak dan tidak memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi yaitu: 1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; 2) perubahan sikap dan persepsi terhadap korupsi; 3). Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi¹³ Ketiga tujuan pendidikan antikorupsi ini dapat dicapai jika terjadi sinergi antara keadaan di lingkungan pendidikan dan keadaan masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak akan berhasil jika setelah tidak berada di lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah anak justru dekat dengan hal yang mengajak ke arah korupsi.

Pendidikan antikorupsi yang dilakukan diberbagai negara seperti Italia, Makau, Moldova, Kolombia, Amerika Serikat, Zambia, dan Brasil Semuanya mengarah pada pentingnya pendidikan moral¹⁴. Moral seseorang yang kurang baik diindikasikan sebagai penyebab seseorang tersebut melakukan korupsi oleh karena itu pendidikan moral merupakan bagian penting dalam pendidikan antikorupsi yang dilakukan diberbagai negara. Pendidikan antikorupsi lebih mengarah pada pembenahan moral dan karakter

¹²Sumiarti. *Pendidikan Antikorupsi*. Jurnal Insanika Vol. 12 No. 2. (2007), hal. 8

¹³Lukman Hakim. *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta ‘Lim Vol. 10 No. 2,(2012). hal. 145.

¹⁴Suradi. *Pendidikan Antikorupsi*. (Yogyakarta: Gava Media, 2014)hal. 15

individu agar individu selalu melakukan hal yang baik dan tidak melakukan korupsi sebab korupsi merupakan salah satu tindakan yang tidak baik.

Pada hakikatnya korupsi merupakan sebuah persoalan tentang moralitas, bagi seseorang yang memiliki tingkat moralitas yang baik tidak akan melakukan tindakan tak terpuji (korupsi). Oleh karena itu, pendidikan moralitas sangat diperlukan dalam membentuk pribadi yang baik. Pendapat tersebut menegaskan bahwa pentingnya pendidikan moral untuk mengatasi permasalahan korupsi yang terjadi saat ini. Pendidikan moral nantinya akan bermuara pada karakter, moral yang baik tentunya akan membuat karakter seseorang menjadi baik. Orang yang baik tidak akan melakukan tindakan buruk oleh karena itu orang yang baik tidak akan melakukan tindak korupsi.

3. Moral dan Dilema Moral

Antikorupsi erat kaitanya dengan moral, antikorupsi merupakan perbuatan yang mempunyai moral sebab orang yang melakukan tindakan buruk (korupsi merupakan salah satu tindakan buruk) dianggap tidak bermoral. Oleh sebab itu berbicara tentang antikorupsi maka akan bersinggungan langsung dengan yang namanya moral. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan antikorupsi berkaitan erat dengan pendidikan moral, untuk bisa menjadi anti korupsi seseorang harus mempunyai moral yang baik. Penjelasan tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Hall dan Davis “Istilah ‘moral’ juga sering digunakan dalam pengertian evaluatif berarti moral benar sebagai lawan salah secara moral atau tidak bermoral¹⁵. Ketika beberapa tindakan tertentu dibicarakan sebagai ‘hal bermoral’ dalam situasi tertentu, apa yang tersirat tidak hanya bahwa itu adalah pertanyaan tentang benar dan salah, tetapi itu adalah tindakan yang benar. Rasa di mana kita akan menggunakan istilah moral, bagaimanapun, berarti sama secara umum di mana "moral" menandakan bahwa pertanyaan atau masalah tertentu yang melibatkan isu-isu dari benar dan salah”. Moral selalu dikaitkan dengan

¹⁵R.T. Hall, dan J.U. Davis. *Moral Education In Theory and Practice*. (New York: Prometheus, 1975). hal. 15

nilai-nilai yang baik sebab orang yang baik dikatakan bermoral dan orang yang melakukan tindakan yang buruk dikatakan tidak bermoral.

Hall dan Davis menjelaskan definisi moral sebagai berikut “Dalam arti asli dan istilah ‘moral’ mengacu pada isu-isu pertimbangan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang relevan.¹⁶ Pertanyaan moral yang membutuhkan cara berpikir yang berusaha untuk membangun hubungan antara keputusan seseorang tertentu dan nilai-nilai yang atau prinsip-prinsip”. Moral itu mengacu pada sebuah pertimbangan keputusan yang mengarah pada sesuatu yang dianggap baik, seseorang perlu melakukan analisis dan berpikir kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil tidak ada yang salah tidak juga benar namun konsekuensi yang diambil dari keputusan tersebutlah yang akan membuat seseorang dikatakan bermoral baik atau buruk. Bila keputusan dari pertimbangan yang telah dilakukan berimbang baik untuk banyak orang maka orang tersebut akan dianggap baik namun jika keputusan dari pertimbangan yang telah dilakukan berdampak buruk maka sudah pasti orang tersebut dianggap buruk. Jadi berbicara tentang moral pasti membicarakan tentang dilema moral, analisis, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan.

Kohlberg Percaya bahwa terdapat tiga tingkat perkembangan moral yang masing-masingnya ditandai oleh dua tahap. Untuk dapat memahami teori Kohlberg ini yaitu dengan melihat perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal¹⁷. Perubahan yang dikendalikan eksternal menuju perubahan yang dikendalikan internal dapat diketahui melalui 3 tingkatan perkembangan yang dikemukakan Kohlberg yang setiap tahapnya berisi 2 tahap. Ketiga tingkatan perkembangan moral beserta dua tahapannya menurut Kohlberg adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Prakonvensional

¹⁶R.T. Hall, dan J.U. Davis. *Moral Education*, hal. 15

¹⁷Santrock, J.W. (2002). *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. (Terjemahan Judan Damanik & Achmad Chusairi). Jakarta: Erlangga, hal. 5

Pada tingkat ini anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh hadiah dan hukuman.

a. Orientasi hukuman dan ketaatan

Pada tahap ini penalaran didasarkan atas hukuman, anak-anak taat karena orang tua menuntut untuk taat, jika tidak taat maka akan diberi hukuman, anak-anak akan cenderung menghindari hukumannya.

b. Individualisme dan tujuan

Pada tahap ini penalaran didasarkan atas hadiah dan kepentingan sendiri. Anak-anak taat apabila mereka ingin taat dan bila yang paling baik untuk kepentingan terbaik adalah taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan menghasilkan hadiah.

2. Tingkat Konvensional

Pada tingkat ini internalisasi individual berada di tengah tengah antara pra konvensional dan pasca konvensional. Seseorang menaati standar-standar (internal) tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain (eksternal), seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat.

a. Norma-norma interpersonal

Pada tahap ini seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan-pertimbangan moral. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orangtuanya pada tahap ini, sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang “perempuan” yang baik atau seorang “laki-laki” yang baik.

b. Moralitas sistem sosial

Pada tahap ini pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban.

3. Tingkat Pascakonvensional

Pada tingkat ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi.

a. Hak-hak masyarakat Vs Hak-hak Individual

Pada tahap ini seorang memahami bahwa nilai-nilai dan aturan-aturan adalah bersifat relatif dan bahwa standar dapat berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Seseorang menyadari bahwa hukum penting bagi masyarakat, tetapi mengetahui juga bahwa hukum dapat diubah. Seseorang percaya bahwa beberapa nilai, seperti kebebasan lebih penting daripada hukum.

b. Prinsip-prinsip etis universal

Pada tahap ini seseorang telah menegembangkan suatu standar moral yang didasarkan pada hak-hak manusia yang universal. Bila menghadapi konflik antara hukum dan suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati walaupun keputusan itu melibatkan resiko pribadi.

Kohlberg menggunakan kasus yang disebut dilema moral dalam merumuskan konsep perkembangan moral seperti di atas. Dilema moral merupakan sebuah keadaan dimana seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh seseorang namun dalam penyelesaiannya terdapat pertentangan hati dan pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini. Bagaimana keputusan yang diambil dapat dipisahkan ke dalam 6 tahapan perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg di atas.

4. Pendidikan Antikorupsi Melalui Dilema Moral

Dilema moral dapat digunakan sebagai sebuah metode pembelajaran dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi melalui dilema moral dapat dilakukan dengan memberikan sebuah kasus dilema moral berkaitan dengan korupsi atau nilai-nilai universal seperti kejujuran dan melakukan perbuatan baik untuk semua orang yang harus diselesaikan peserta didik. Penyelesaian dari peserta didik tersebut kemudian dibahas dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang dikemukakan oleh Kohlberg. Jika penyelesaian atau keputusan yang dipilih peserta didik sudah mengarah pada tahap ke 6 berarti peserta didik tersebut sudah bisa dikatakan bermoral baik.

Tujuan pembelajarannya yaitu membuat peserta didik dapat menyelesaikan masalah dilema moral yang berkaitan dengan antikorupsi sesuai tahapan ke 6 pada tahapan perkembangan moral Kohlberg. Apabila sudah dapat melakukan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dilema moral sesuai tahapan prinsip etis dan universal maka tinggal mempertahankan dan mempraktikkannya sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sekedar teori.

Agar pendidikan antikorupsi yang dilakukan menggunakan dilema moral berhasil, guru harus dapat menyampaikan permasalahan secara jelas dan tidak ambigu sehingga bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Misalnya “disebuah pertandingan bola basket seorang wasit disuap agar memenangkan salah satu tim, wasit tersebut membutuhkan uang untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Apa yang harus dipilih oleh wasit?” Guru harus jelas dalam menyampaikan permasalahan yang harus diselesaikan anak semacam ini, atau bisa juga permasalahan yang disampaikan tersebut disajikan melalui bermain peran. Guru membuat skenario tentang permasalahan tersebut kemudian skenario ini bisa diperankan peserta didik di kelas.

Pembelajaran antikorupsi dengan metode dilema moral ini dapat diterapkan di Sekolah Dasar, SMP, dan juga SMA. Pembelajaran dengan metode dilema moral juga bisa diterapkan di sekolah dasar, guru sekolah dasar harus bisa membuat dan memilih kasus dilema moral yang cocok dan sesuai untuk anak didiknya. Tidak perlu memunculkan kasus yang terlalu rumit. Bisa saja misalnya “saat ulangan Yudi tidak bisa menjawab 7 dari 10 soal yang diberikan guru, dan waktu tinggal 10 menit jika tidak menjawab maka nilainya akan menjadi jelek. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Yudi?”. Kasus seperti ini merupakan salah satu contoh kasus tentang dilema moral dan berkaitan dengan korupsi yang bisa dibuat oleh seorang guru SD untuk menanamkan sikap dan karakter antikorupsi pada peserta didiknya. Guru dapat membuat kasus-kasus dilema moral lainnya dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi ataupun untuk mengajarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan karakter dan moralitas.

Dalam memilih keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dilema moral biarkan peserta didik menganalisis sendiri kasusnya. Guru tidak boleh membantu memberikan jawaban agar peserta didik, dalam pembelajaran dilema moral guru juga tidak boleh mendoktrin mana yang benar mana yang buruk, biarkan peserta didik menganalisis, berpikir kritis dan mengambil keputusan sesuai pertimbangannya sendiri. Bukan permasalahan benar atau salahnya tetapi belajar tentang konsekuensi dan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipilih itu yang terpenting. Pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh sendiri oleh peserta didik membuat peserta didik menjadi lebih bisa memahami apa yang dipelajari. Selain itu dengan mengalami sendiri apa yang dipelajari akan melekat dan tertanam pada peserta didik.

Untuk membantu pendidikan antikorupsi melalui metode dilema moral dibutuhkan juga pendidikan agama. Kenapa pendidikan agama? sebab pendidikan agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai luhur, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk saling menyakiti orang lain. Semua agama mengajarkan nilai-nilai yang universal, termasuk nilai melawan korupsi. Tidak ada agama yang setuju terhadap korupsi, karena korupsi merupakan tindakan tidak baik yang merugikan orang lain. Oleh karena itu pendidikan antikorupsi melalui dilema moral akan lebih efektif lagi jika dibantu dengan pendidikan agama untuk melawan korupsi.

C. KESIMPULAN

Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menggerogoti bangsa Indonesia, bahkan karena saking banyaknya korupsi di Indonesia korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan buruk yang merugikan bangsa dan negara sudah sepatutnya korupsi itu dibumihanguskan dari Indonesia. Salah satu obat yang sudah diberikan yang sudah dilakukan adalah pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya KPK masih belum cukup sebab KPK hanya sekedar mengobati bukannya mencegah. Pencegahan sudah saatnya harus dilakukan dengan merubah pola pikir dan mental masyarakat untuk menentang korupsi sehingga tidak akan melakukan korupsi sekalipun ada kesempatan.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan merubah pola pikir dan mentalitas warga dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu menggunakan metode dilema moral dalam pembelajaran. Metode dilema moral dapat membantu menanamkan sikap dan karakter antikorupsi pada peserta didik dengan baik, sebab peserta didik diajak mengambil keputusan sendiri berdasarkan hasil menganalisis dan berpikir kritis. Memang efeknya akan lama tetapi kemungkinannya untuk bisa mencegah korupsi sangat besar. Dimasa yang akan datang ketika anak-anak yang diajar saat ini menjadi dewasa mereka sudah mempunyai sikap dan karakter antikorupsi oleh karena itu kemungkinan mereka tidak akan melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Lukman. *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam –Ta ‘Lim Vol. 10 No. 2.,2012.
- Hall, R.T & Davis, J.U.. *Moral Education In Theory and Practice*. New York: Promotheus, 1975
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka, 1976
- Puspito, Nanang T., et al., *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011
- Salama,Nadiatus *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Motif dan Proses Psikologi Korupsi*. Jurnal Psikologi Vol. 41 No. 2. 2014
- Santrock, J.W. *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. (Terjemahan Judan Damanik & Achmad Chusairi). Jakarta: Erlangga, 2002
- Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2013
- Sumiarti. *Pendidikan Antikorupsi*. Jurnal Insania Vol. 12 No. 2., 2007
- Suradi. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Gava Media, 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua,Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yamin,Muhammad.*Tindak Pidana Khusus*, Bandung : Pustaka, 2012
- Zuchdi, Darmiyati dkk. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Bidang Studi Di Sekolah Dasar*. Cakrawala Pendidikan, Mei 2010 (Yogyakarta: UNY Press, 2010